



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 91200054718530004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : PT SURVEYOR INDONESIA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 9120005471853   |
| 3. Alamat Kantor  | : Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56,<br>Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta<br>Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12950 |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMA   |
| 5. No. Telepon  | : 0215265525  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya   |
| 7. Lokasi Usaha   | : Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 56, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec.<br>Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12950                             |
| 8. Status   | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Agustus 2022

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Menteri Investasi/**  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Bahlil Lahadalia**

Dicetak tanggal: 18 Agustus 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

IZIN : 91200054718530004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama Tenaga Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan *) c. KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing *) d. Ijazah *) e. Curriculum vitae *) f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP</li><li>- Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten; d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: 1) untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan, 2) apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan, 3) melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon</li><li>- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)</li><li>- Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang)</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal</li><li>- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

**IZIN:91200054718530004**

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SURVEYOR INDONESIA
2. Jenis, bidang dan subbidang usaha jasa : Terlampir

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berhak mengajukan perubahan bidang dan subbidang usaha jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1q3OOY/91200054718530004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## SUSUNAN PENGURUS

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	Muhammad Haris Witjaksono	Direktur Utama	09.183.261.8-416.000
2	Rosmanidar Zulkifli	Direktur	09.226.866.3-434.000
3	Saifuddin Wijaya	Direktur	47.342.897.7-002.000
4	Lussy Ariani Seba	Direktur	47.800.920.2-005.000
5	Ir Dody Widodo	Komisaris Utama	57.331.989.4-432.000
6	Paulus Prananto	Komisaris	05.252.412.1-016.000
7	Ferry Andrianto	Komisaris	67.841.906.0-407.000
8	Djatkiko Bris Witjaksono	Komisaris	68.276.392.5-404.000
9	Wawan Sunarjo	Komisaris	47.242.536.2-416.000

## PEMEGANG SAHAM

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1	Negara Republik Indonesia	INDONESIA	Rp. 1.000.000;	0,04
2	PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	INDONESIA	Rp. 21.279.000.000;	85,08
3	Societe Generale De Surveillance Holding S.A. Geneva	SWITZERLAND	Rp. 2.600.000.000;	10,4
4	PT. Superintending Company Of Indonesia di singkat PT.Sucofindo Persero	INDONESIA	Rp. 1.120.000.000;	4,48

## KLASIFIKASI BIDANG USAHA

No.	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha
1	Pelaksanaan	Studi kelayakan	Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL)
2	Pelaksanaan	Studi kelayakan	Penyusunan Studi Kelayakan
3	Pelaksanaan	Eksplorasi	Manajemen eksplorasi
4	Pelaksanaan	Eksplorasi	Penentuan posisi
5	Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan topografi
6	Pelaksanaan	Eksplorasi	Pemetaan geologi
7	Pelaksanaan	Eksplorasi	Perhitungan sumber daya dan cadangan
8	Pelaksanaan	Lingkungan pertambangan	Pemantauan lingkungan
9	Pelaksanaan	Lingkungan pertambangan	Survei RKL/RPL
10	Pelaksanaan	Lingkungan pertambangan	Audit lingkungan pertambangan
11	Pelaksanaan	Keselamatan pertambangan	Pemeriksaan dan pengujian teknik
12	Pelaksanaan	Keselamatan pertambangan	Audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

1q300Y/91200054718530004

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

